

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Satya, 2016, *Hukum Administrasi Perpajakan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- J., Moelong L., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., ... & Wulandari, S. S. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana, Asep N, 2014, *Sanksi Hukum Berbasis Penerimaan Negara*, CV Aneka Ilmu, Semarang.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.
- Resmi S, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6, Buku I*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Rodiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Pusaka Almaida, Jakarta.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Siahaan, M. P. (2016). Pajak daerah dan retribusi daerah.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soeparman, 1994, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suandy E, 2013, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

Suyanto, S. H., 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Unigres Press, Kabupaten Gresik.

B. Artikel Jurnal

Adiasa, Nirawan. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko". *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.4, 2013.

Adnyana dan Jati. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan E-Spt, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 25, No. 1, 2018.

Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M., "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor", *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23, 2020.

Anis Ridho Wardati, Iskandar dan Salmah Pattisahusiwa, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)", *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* Vol. 7 No. 3, 2022.

Aprilia, Rani, and Rusdi Rusdi, "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jambura Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I., "Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 2019.

Darmakanti, Ni Made, and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi", *Jurnal pacta sunt servanda*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya, "Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi dan*

Manajemen Akmenika Vol. 15 No. 2, 2018.

Dikdik, Harjadi, “Peranan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua”, Jurnal Universitas Kuningan. 2020.

Edi Sudiarto, Dkk., “Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang”, Inspirasi; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.17, No.2, 2020.

Ely, M. W., Pietersz, J. J., & Bakarbesy, A. D., ”Sanksi Administrasi Dalam Surat Edaran”, LUTUR Law Journal, 4(2), 107-112. 2023.

Hany, Sharah Puan dkk., “Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Journalku, Vol. 3, No. 2, 2023.

I Kadek Denny Harta Dwipayana, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Implikasi dari Sanksi Administrasi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2, 2020.

Indah Pratiwi, Dkk., “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Cimareme)”, Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung. 2019.

Jeremi Alessandro, Said Aneke R, dan Fonnyke Pongkorung, “Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Lalai Membayar Pajak dalam Perspektif Hukum Perpajakan di Indonesia”, Lex Administratum Vol. 10 No. 2, 2022.

Junaid, M. T., Azis, M. I., Ardiansyah, R., Banding, M. P., & Malik, A. D., “Pelatihan Pengisian SPT Tahunan WPOP di Lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Paguntaka, 1(1), 9-13. 2020.

Jurnal Borobudur Law And Society Vol. 1 No. 5 (2022) Pp. 8-19.
<https://Journal.Unimma.Ac.Id/Index.Php/Blastal>

Mahdani, Tia Mulya, dan Ismet Ismatullah., “Pengaruh Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”, JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi). Vol. 6, No. 1, 2021.

Mahendra, Dkk. 2021. “Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Buleleng”, Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 12. No. 1. 2021.

- Marini Ika Fajar Astuti, Dkk., “Efektivitas Pembebasan Sanksi Administratif Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor”, Jurnal Akutansi, Vol. 2. No. 1. 2021.
- Maulana, Muhammad Dian, dan Dwi Septiani, “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat. Cianjur”, Jurnal Akuntansi, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Muhammad Dian Maulana, Dkk., “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha Volume 14, Nomor 2, November 2022.
- Putri, A. K., & Taun, T. ”Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(1), 2023.
- Putri, A. R., “Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM), 1(1), 23-30. 2023.
- Putri, Anggi Kania, and Taun Taun, Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9. No 1, 2023.
- Rahmasary, Rida Rizqi, “Kualitas Pelayanan Samsat dan Kepatuhan Pajak Kendaraan ”, Jurnal Akutansi Indonesia, Vol. 8. No. 1. 2021.
- Rostanti, I., “Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY dengan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi”, 2017.
- Saputra, M., “Pengaruh jumlah dan mutasi kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota yogyakarta”, Jurnal Ekobis Dewantara, 1(9). 2018.
- Sari, R. V. Y., & Susanti, N., “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelayanan pendapatan provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”, *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1). 2021.
- Setiady, Tri, dan I. Ketut Astawa, “Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara”, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Sharah Puan Hany, Dkk., “Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undangundang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Journalku, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Simanungkalit, T. B., ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Pbb P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(2), 2017.

Wardani, D. K., & Asis, M. R., “Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”, *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 2017.

Yanti, Widia Dwi Ratna, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Mojokerto)”, *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Yudi Rusyadi, Dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak”, *Jurnal Living Law Issn 2087-4936*, Vol. 12, No. 2, Juli 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 4, Tambahan Lembaran RI No. 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 129, Tambahan Lembaran RI No. 3987. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130, Tambahan Lembaran RI No. 5049. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembar Daerah Tahun 2011, No. 3. Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Badan Daerah Tahun 2015, No. 23. Yogyakarta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 tentang Hal Keuangan.

D. Hasil Penelitian

Dewi, I. I. 2022, Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kasus pada UPPD/Samsat Kabupaten Purbalingga (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

Kurniawan, A. 2020, Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare Nusantara Press).

Kurniawan, B. E. 2010, Evaluasi penetapan dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor samsat Surakarta (studi kasus pada up3ad Samsat Surakarta).

Lestari. 2022, Kualitas pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Manurung, R. 2019, Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Satriani. 2017, Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor. Pelayan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar: Universitas. Hasanuddi

E. Internet

ANTARA News Yogyakarta. (2022). Pemkot Yogyakarta Naikkan Target PAD 7,65 persen pada Rancangan APBDP 2022.

Juliawanti, Linda. Mengenal NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) dan Cara Menghitungnya. <https://duitpintar.com/njkb-nilai-jual-kendaraan-bermotor/> (diakses pada tanggal 16 September 2023).

Kantor Pelayanan Pajak daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman. <https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/index.php/beranda/profil-kppd-sleman> (diakses pada tanggal 16 September 2023)

Leon, Yosef, “Sampai Awal Oktober, Capaian Pajak Kendaraan Bemotor di DIY 78 Persen dari Target Rp 961 Miliar”, Harian Jogja, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/09/510/1151144/sampai-i-awal-oktober-capaian-pajak-kendaraan-bermotor-di-diy-78-persen-dari-target-rp961-miliar>, (diakses pada tanggal 13 Mei 2024).

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023). Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor 2023. Diakses dari warta.jogjakota.go.id(Portal Data SIKD. (2024). Kota Yogyakarta: Data APBD Tahun 2020. Diakses dari djk.kemenkeu.go.id

Sidik, Hery, “Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Bantul Rp 8 Miliar/Tahun”, Antara Yogya, <https://jogja.antaranews.com/berita/408839/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-bantul-rp8-miliartahun>, (diakses pada tanggal 13 Mei 2024)